



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMBAL RIYANTO**
2. Jabatan : **AUDITOR MADYA SELAKU KOORDINATOR PENGAWASAN KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR BIDANG INVESTIGASI**
3. NHK : **51202**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/50 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/100 m2 di KAB / KOTA TEGAL, WARISAN Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 304.5 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 134.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 28.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 79.480.678**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.867.480.678**III. HUTANG** Rp. 46.456.400**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.821.024.278

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.